

PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOYOLALI DAN KABUPATEN PEMALANG 2015

Ace Rahmat Rodia Jamasari - 14010114140104

jamasari.ace@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Drs. Yuwanto, M.Si, Ph.D**

yuwantosaja@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Perubahan dari Pemilu tidak langsung menjadi Pemilu langsung khususnya di tingkat daerah membawa tantangan dan konsekuensi tersendiri. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah mengenai tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu. Pelaksanaan Pilbup Boyolali dan Pilbup Pemalang sejak tahun 2005 hingga 2015 memiliki trend yang cukup menarik. Pada Pilbup Boyolali cenderung memiliki trend partisipasi yang tinggi, sedangkan dalam Pilbup Pemalang cenderung memiliki trend partisipasi yang rendah jika dibandingkan dengan Pilbup/Pilwakot lainnya di Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan tingginya partisipasi pada Pilbup Boyolali 2015 dan faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pada Pilbup Pemalang 2015.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi politik pemilih. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian campuran (mixed methods) dengan strategi metode campuran eksploratoris sekuensial (sequential exploratory mixed methods), dan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian dan menarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa tingginya partisipasi pada Pilbup Boyolali 2015 disebabkan oleh efektifnya kinerja KPU dalam menyosialisasikan tahapan dan informasi pemilu dengan menggunakan berbagai pendekatan sosialisasi. Pemutakhiran data pemilih juga dilakukan secara berkala dengan melakukan croscheck intensif disetiap tahapan pemilihan. Masyarakat turut berperan aktif dalam mengawal akurasi data pemilih dengan kembali memastikan validitas DPT yang dikeluarkan oleh KPU. Selain itu faktor sosial budaya yang masih kental dalam masyarakat serta kesadaran politik pemilih dan status sosial ekonomi pemilih yang cukup tinggi juga menjadi faktor yang menyebabkan tingginya partisipasi pemilih pada Pilbup Boyolali 2015.

Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih di Pilbup Pemalang Tahun 2015 disebabkan oleh DPT yang tidak akurat dan respon pemilih yang minim terhadap validitas DPT, serta rendahnya tingkat kesadaran politik pemilih yang ditandai dengan kejenuhan masyarakat terhadap kondisi politik yang berkembang.

KATA KUNCI

Pilbup, Partisipasi Pemilih

Pendahuluan

Semangat dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung sebetulnya merupakan koreksi atas kekurangan proses maupun hasil pilkada secara tidak langsung lewat DPRD dibawah UU Nomor 22 Tahun 1999. Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan pilkada adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam dan meningkatkan kualitas demokrasi (Suharizal, 2011).

Pilkada langsung dipastikan membuka ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan kedaulatan dalam menentukan pemimpin di daerah. Tujuan ideal pilkada langsung antara lain terpilihnya Kepala Daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, kepribadian dan moral yang baik. Idealnya, Kepala Daerah terpilih adalah orang-orang yang berkenan di hati rakyat, dikenal dan mengenal daerah, serta memiliki ikatan emosional kuat terhadap rakyat daerah.

Perubahan dari Pemilu tidak langsung menjadi Pemilu langsung khususnya di tingkat daerah membawa tantangan dan konsekuensi tersendiri. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Mengutip pendapat Sjahchran Basah (1989), menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan merupakan ciri mutlak dari demokrasi, yang juga berarti rakyat ikut serta melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Tinggi rendahnya legitimasi suatu pemerintahan dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu (*voter turnout*). Apabila angka partisipasi masyarakat tinggi maka pasangan calon terpilih cenderung mempunyai legitimasi yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sedangkan angka partisipasi yang rendah mengindikasikan rendahnya kualitas Pemilu.

Pelaksanaan Pilbup Boyolali dan Pilbup Pemalang sejak tahun 2005 hingga 2015 memiliki trend yang cukup menarik. Pada Pilbup Boyolali cenderung memiliki trend partisipasi yang tinggi, sedangkan dalam Pilbup Pemalang cenderung memiliki trend partisipasi yang rendah jika dibandingkan dengan Pilbup/Pilwakot lainnya di Jawa Tengah.

Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti (1992), partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sementara Michael Rush dan Philip Althof menjelaskan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan public

Berbagai definisi partisipasi politik dari para pakar ilmu politik tersebut diatas, dapat disimpulkan partisipasi politik bersubstansi *core political activity* yang bersifat personal dari setiap warga negara secara sukarela untuk berperan serta dalam proses pemilihan umum untuk memilih para pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penetapan kebijakan publik.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam Bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, merupakan hal yang sangat penting pula untuk dielaborasi, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga Negara berperan serta dalam proses politik. Menurut pendapat

beberapa ahli beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik antara lain:

a. Status sosial dan ekonomi

Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik (Surbakti, 1992).

b. Situasi

Menurut Ramlan Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman (Surbakti, 1992).

c. Afiliasi politik orang tua

Afiliasi berarti bergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1992).

a. Faktor Penyelenggara

Penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai peran penting dalam menyukkseskan pemilu diantaranya dengan menjamin setiap hak dan kedaulatan pemilih, melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan sosialisasi tahapan dan informasi pemilu serta menjamin kemudahan bagi setiap warga untuk menggunakan hak pilihnya, termasuk pemilih berkebutuhan khusus.

b. Status Sosial dan Ekonomi

Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik (Surbakti, 1992).

c. Situasi

Menurut Ramlan Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman (Surbakti, 1992).

d. Pengalaman Berorganisasi

Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama (Bonar Simangunsong : 2004). Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Ibnu Kencana (1997), partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam sikap pertanggung jawaban bersama baik dalam situasi politik yang melibatkan dukungan

e. Kesadaran politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup (Hendrik, 2010)

f. Kepercayaan terhadap pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan (Hendrik, 2010).

Rosenberg dalam Maran (2007) mengemukakan tiga alasan mengapa orang tidak ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu :

- a. Adanya ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Disini orang beranggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman bagi kehidupannya.
- b. Adanya anggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan suatu yang sia-sia. Disini orang merasa partisipasi politiknya hanya sia-sia dan tidak akan mempengaruhi proses politik.
- c. Tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Maksudnya adalah orang tidak menghargai gagasan politik. Tidak ada hasil yang dapat diperik dari partisipasi politik tersebut, sehingga mereka merasa enggan dan tidak mau untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Selain itu menurut hasil survei LSI, ada beberapa sebab mengapa seorang warga yang mempunyai hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya, diantaranya :

- a) Alasan Teknis seperti tidak terdaftar sebagai pemilih, sakit, sedang pindah dan belum mendapatkan KTP baru, tidak mendapat surat undangan dari panitia pemilihan, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan pada waktu bersamaan dan sebagainya.
- b) Sikap pesimis terhadap hasil pemilu seperti merasa pemilu tidak ada gunanya, tidak membantu memperbaiki keadaan, tidak ada kandidat yang dinilai bisa mewakili aspirasi pemilih.

Tingginya angka absensi dalam Pemilu/Pilkada menurut Suharizal (2012) sekurang-kurangnya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu :

- a) Ketidakpercayaan terhadap para kandidat
- b) Kejenuhan terhadap hiruk pikuk politik
- c) Kurangnya sosialisasi

Lebih jauh Suharizal mengutip pendapat Fitra Arsil dkk (2005) menjelaskan alasan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya yaitu karena tidak terdaftar sebagai pemilih (kesalahan penyelenggara pilkada yang tidak mendata pemilih secara cermat) maupun sengaja tidak menggunakan hak pilihnya (Golput) sebagai bentuk kejenuhan warga terhadap proses politik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran (*mixed methods*) dengan strategi metode campuran eksploratoris sekuensial (*sequential exploratory mixed methods*), yaitu pengumpulan data kualitatif pada tahap pertama, yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil-hasil tahap pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini dihasilkan melalui wawancara dan survey yang dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian dan menarik kesimpulan

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih dalam Pilbup Boyolali dan Pilbup Pemalang Tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara dan proses penelitian di lapangan, peneliti menemukan faktor-faktor penyebab tingginya partisipasi pemilih pada Pilbup Boyolali tahun 2015 dan faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada Pilbup Pemalang tahun 2015, yaitu sebagai berikut :

Faktor yang menyebabkan tingginya partisipasi pemilih pada Pilbup Boyolali 2015 disebabkan oleh dua hal utama. Pertama berkaitan dengan faktor penyelenggara, yaitu kinerja KPU Kabupaten Boyolali dalam menyosialisasikan tahapan dan informasi pemilu dan proses pemutakhiran data pemilih. Intensitas sosialisasi dengan model pendekatan sosialisasi berbasis keluarga menjadi strategi KPU Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Upaya pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkala dengan melakukan *crosscheck* intensif disetiap tahapan pemilihan. Masyarakat juga turut berperan aktif dalam mengawal akurasi data pemilih ini dengan kembali memastikan validitas DPT yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Boyolali.

Dalam proses pelaksanaan sosialisasi, KPU bekerja sama dengan berbagai Lembaga di berbagai tingkatan. KPU juga mengutamakan sosialisasi berbasis keluarga. Dimana keluarga

merupakan agen untuk menyebarluaskan informasi beserta tahapan Pilbup. Dari hasil survey yang dilaksanakan di Kecamatan Musuk dan Kecamatan Selo, 46,9% responden menganggap KPU cukup intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Respon masyarakat mengenai strategi sosialisasi ini juga positif. 89,1% responden mengakui bahwa intensitas sosialisasi mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Sedangkan media sosialisasi yang paling efektif menurut responden ialah dengan metode tatap muka secara langsung

Faktor kedua yaitu berkaitan dengan faktor individu/pemilih. Status sosial ekonomi dan kesadaran politik pemilih yang relatif tinggi, serta ditunjang dengan lingkungan sosial budaya yang masih kental, menjadi faktor yang menggerakkan pemilih untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Status sosial ekonomi yang relatif tinggi dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduk sekitar 7,01 tahun, pendapatan perkapita yang mencapai 24,3 juta rupiah dan dilihat dari pekerjaan utama yaitu sebagai petani. Selain itu adanya anggapan bahwa mengikuti Pemilu merupakan suatu kewajiban, adanya harapan yang tinggi terhadap pemerintah, adanya harapan pemilu bisa membawa perubahan, adanya keyakinan bahwa kandidat Pilbup mewakili kepentingan pemilih merupakan rangkaian alasan-alasan yang menjadi motivasi pemilih untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam Pilbup Boyolali 2015.

Disi lain lingkungan sosial budaya juga memiliki andil yang cukup signifikan. Peran serta tokoh masyarakat dalam mempengaruhi keputusan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya cukup efektif dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih. Adanya anggapan “wajib menghadiri undangan” yang dipercayai oleh mayoritas masyarakat Boyolali menjadi salah satu motivasi pemilih untuk berangkat dan menggunakan hak pilihnya di TPS.

Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih pada Pilbup Pemalang Tahun 2015 disebabkan oleh dua faktor. Pertama berkaitan dengan faktor penyelenggara, yaitu mengenai DPT yang tidak akurat dan metode sosialisasi yang tidak banyak berubah dengan metode sosialisasi pada Pemilu 2014. Kedua yaitu faktor individu/ pemilih, berkaitan dengan status sosial ekonomi pemilih dan kesadaran politik pemilih yang relatif rendah. Hal tersebut ditandai dengan kejenuhan masyarakat terhadap kondisi politik yang berkembang dan minimnya respon masyarakat terhadap validitas DPT yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pemalang

Ucapan Terima Kasih

Jurnal ini didedikasikan kepada KPU Boyolali dan KPU Pemalang serta kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Althoff, Michael Rush dan Phillip. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Basah, Sjachran. 1983. *Ilmu Negara*. Bandung : Alumni
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Akarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Cholisin. 2007. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta : UNY Press
- Creswell. 2014. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Djajadi, Iqbal dan kawan-kawan (Eds). 1999. *Kisah Perjuangan Reformasi*. Jakarta : Pustaka Sinar harapan
- Firmanzah, 2007. *Marketing Politik*, edisi pertama, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,
- Haris S, Sanit A, Hikam AS M, Salam A, Cahyono H (Eds). 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI

- Hendrik, Doni. 2010. Variabel Variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *Demokrasi*. Vol. IX No. 2, hal 137-148.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan. Salemba Humanika
- Munjani, Saiful dkk. 2012. *Kuasa Rakyat*. Jakarta Selatan : Mizan Publika
- Maran, rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nurhaiman. *Percepatan dan perlambatan demokrasi di tingkat lokal : pemilihan kepala daerah dalam politik indonesia*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksar
- Sastroatmodjo, Sudjono. 1995. *Perilaku politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widya Sarana
- Susanto, 2005. Pilkada Langsung: Kajian Yuridis dan Politis. *Jurnal Dinamika* Vol. V No. I, Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
- Suharizal, 2012. *Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta : Rajawali Pers
- Syafiie, Kencana Inu. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. (2nd eds). Bandung : Mandar Maju
- Trichahyo, Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilu : Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang : In-Trans Publishing.
- Utomo C Tri & Pradhanawati Ari, *Pemilu dan Demokrasi* (Semarang : Jalan Mata, 2009), hal. 2, mengutip Greenberg (1986 : 182)
- Surbakti, Ramlan dkk. 2011. *Menjaga Kedaulatan Pemilih*. Jakarta Selatan : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Budiardjo, Miriam. 1994. *Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. 2015. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Boyolali 2015*.
- Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Boyolali Tahun 2015
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. 2015. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang 2015*.
- Laporan Penyelenggaraan Pilbup Boyolali Tahun 2015
- Laporan Penyelenggaraan Pilbup Pemalang Tahun 2015

Daftar Informan

- Nur Hadiwibowo – Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Pemalang
- Rizky Veriyanti – Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Boyolali

Tentang Penulis

Ace Rahmat Rodia Jamasari adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.